

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2013, *Lembaga Kenotarium Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Ghofur Ansori, 2019, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Pres, Yogyakarta.
- Abdul Halim, 2015, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Adjie, 2014, *Penggerogotan Weewenang Notaris Sebagai Peejabat Umum*, Renvoi Nomor 4 Th II 3 September 2014, Gramedia Pustaka, Indonesia.
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2011, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Corry Enny Setyawati, 2020, *Perolehan Ha katas Tanah dan Bnagunan (BPHTB)*, CV. Azka Pustaka, Sumbar.
- Erly suandy, 2016, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- J.Supranto, 2013, *Metode Penelitian Hukum Dan Statisti*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014, *Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta.
- Liliana Tedjosaputro, 2013, *Etika Profesi dan Proofesi Hukum*, Anekaa Ilmu, Semarang.
- Marihot Pahala Siahaan, 2015, *“Bea Perolehan Hak Atas tanah Dan Bangunan, Teori Dan Praktek”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Majalah Kontan, 2015, *Selama Perda belum terbit, tidak boleh pungut BPHTB*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Marjanne Termoshuizen, 2012, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2014, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Safri Nurmana, 2013, *Pengantar Perpajakan*, Obor Indonesia, Jakarta.

Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta PPAT*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Setu Setyawan dan Eny Suprapti, 2016, *Perpajakan*, Bayumedia Publishing dan UUM, Press, Malang.

Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Preinsip-preinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta.

Jurnal

Arwinda Dwi Prihandini, Luluk Lusiati Cahyarini, "*Peran Tanggung Jawab PPAT dalam Perhitungan Pajak BPHTB Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*", Jurnal Notarius, Vol 16 Nomor 3 Tahun 2023, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Eko Puji Hartono dan Akhmad Khisni, "*Peranan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bekas Hak Milik Adat Berkaitan Dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan*", Jurnal Akta Volume 5 Nomor 1, Maret 2018.

Emir Adzan Syazali, "*Kepastian Hukum Akta Jual Beli Tanah Pada Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*", Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1 Nomor. 2 Desember 2018.

Haedar Hakim Husainy, "*Analisis Perkembangan Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bagunan Terhadap Jual Beli Tanah*", Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 2 (2020), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Hendra Carmana, "*Sistem Self Assessment Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Berbasis Estimasi Di Kota*

- Bandung Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 2, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Bandung,
- Imron Rizki A., ” *Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan P559ajak Di Indonesia*”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11 No. 2, Juli 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 512BON.
- Jemi Grahono Suryo Gupito, 2020, *Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*, Jurnal Renaissance Vol.3, No. 5, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia.
- Meilan Agu, Sifrid S. Pangemanan, Robert Lambey, 2015, *Evaluasi Penerapan Sistem Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15 No. 04, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia.
- Riesta Yogahastama, “*Peran Serta Notaris Memungut Pajak BPHTB Pembuatan Akta Jual Beli di Kabupaten Pamekasan*”, Jurnal Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, hal. 387
- Ronal Ravianto dan Amin Purnawan, “*Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Pendekatan Self Assessment System*”, Jurnal AKTA, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Suryanto, Bambang Hermanto, Mas Rasmini, 2018, *Analysis Of Potential Land And Building Transfer Tax As One Of The Local Taxes*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan

Kewirausahaan Vol.3, No.3, , Departemen Administrasi Bisnis,
Universitas Padjadjaran, Bandung.

Witri, Mochamad Djudi, Sri Sulasmiyati, 2016, *Analisis Pelimpahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan)*, Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1, Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 Tentang BPHTB